

## Jamur Korupsi di Zamrud Khatulistiwa

“Wani piro?” (berani berapa?)

Ungkapan kecil dalam iklan salah satu produk rokok ini tidak khayal telah membuat orang banyak tertawa ketika menyaksikannya di layar televisi dan ditirukan oleh sebagian orang di masyarakat. Tetapi tidak sedikit pula rasanya iklan tersebut membuat pejabat-pejabat pemerintah senyum-senyum karena mereka pasti dengan cepat mengerti maksudnya.

Kira-kira seperti itulah kondisi pemerintahan negeri ini. “Kalau bisa dipersulit kenapa dipermudah?” adalah sebuah sitiran dari sebagian orang yang sering kali dan “telah terbiasa” mendapatkan perlakuan tidak semestinya dari birokrasi pemerintahan

Jargon-jargon seperti “Jalan tol ini bebas Pungli”, “Hindari menggunakan jasa calo dalam mengurus SIM/STNK”, “Kantor imigrasi bebas calo”, dlsb. mengisyaratkan bahwa praktek-praktek ilegal di dalam birokrasi negara telah begitu masif dalam masyarakat. Tetapi pertanyaannya, adakah peran pemerintah yang dengan serius memberantas atau menindak tegas para

**Untuk membasmi jamur kita tidak bisa terbang pilih dan tidak tuntas sampai ke akar.**

aparatus atau “calo legal” yang ada di dalam tubuh birokrasi itu sendiri dan memberikan pelayanan serta

perlindungan yang baik kepada masyarakat yang hendak menggunakan jasa layanan masyarakat? Atau malah melanggengkan dengan melegalakan praktek birokrasi yang korup karena sekarang calonya dan pelaku “pungli” justru telah berseragam dinas.

Gambaran ini mungkin adalah sesuai dengan apa yang dicirikan tentang sifat kapitalisme di dunia ketiga, bahwa watak dari kapitalis di dunia ketiga itu bersifat komprador, birokratik dan kroni (oligarki). Karena ketiga sifat kapitalis dunia ketiga ini – termasuk Indonesia – praktek



korupsi yang menghisap masyarakat tetap langgeng dan hidup subur seperti jamur di musim penghujan.

Karena watak komprador para birokrat di negara ini, produk-produk import dibiarkan leluasa masuk di Indonesia. Jangankan produk elektronik, handphone dan kendaraan bermotor, produk pertanian mulai dari jeruk, kedelai, beras, kentang, dll juga dimasukkan ke negara agraris Indonesia. Dan lebih parah lagi adalah produk garam yang juga diimport oleh negara

yang memiliki garis pantai yang sangat luas ini.

Sifat komprador ini tentu sangatlah menguntungkan segelintir orang saja, baik pemerintah yang memiliki kuasa untuk membuka jalan masuknya barang-barang import, maupun segelintir kapitalis-kapitalis yang “kulakan” untuk dijual lagi di pasar dalam negeri. Bagaimana nasib para petani dan nelayan kecil? Secara sistematis mereka dihilangkan dari bumi zamrud khatulistiwa ini.

Siapa yang menikmati keuntungan dari hasil import itu? Siapa lagi kalau bukan kroni-kroni yang berwatak komprador bersama birokrat-birokrat yang telah “berjasa” membukakan pintu masuknya barang-barang import.

Praktek korupsi di negeri ini telah begitu masif, seperti jamur di musim penghujan. Para koruptor tidak lagi seperti tikus got yang dijauhi atau dikejar-kejar untuk dibunuh. Koruptor sekarang ini telah berevolusi menjadi jamur kuping, jamur merang, jamur kacing yang enak untuk didekati dan dinikmati. Dan mereka tumbuh subur di zamrud khatulistiwa Indonesia.

Untuk membasmi jamur kita tidak bisa terbang pilih dan tidak tuntas sampai ke akar. Karena jamur sangat mudah untuk berkembang, untuk itu diperlukan tangan yang sangat kuat untuk mengangkat bersama-sama jamur ini sampai ke akar dan menghancurkannya. Siapa lagi tangan kuat itu kalau bukan rakyat pekerja.

Jangan biarkan jamur korupsi tumbuh di lingkungan kita.

- PONCO PUTRAFAJAR

## Korupsi Politik: Dampak Logis dari Demokrasi Borjuis

**K**orupsi adalah tindakan yang masuk kategori kejahatan luarbiasa. Korupsi juga bisa disebut sebagai kejahatan beresiko tinggi. Kenapa beresiko tinggi? Karena sudah pasti akan memiliki dampak yang berat bagi kehidupan masyarakat.

Korupsi, secara umum, bisa didefinisikan sebagai “penyalahgunaan jabatan publik untuk keuntungan pribadi”. Dalam negara borjuis-kapitalis seperti Indonesia, korupsi bisa berproduksi dengan lancar. Bahkan bisa dikatakan sebagai produk unggulan. “Demokrasi”, dalam pengertian normatifnya, mengacu pada ungkapan Abraham Lincoln, berarti “pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”. Dari pengertian normatif mengenai demokrasi ini sebenarnya sudah memberi kesimpulan terang, bahwa pemerintahan dan segala asetnya adalah milik rakyat, bukan milik individu, partai, atau kartel bisnis tertentu. Tetapi pertanyaannya, kenapa praktek korupsi justru tumbuh subur di negara yang menganut filosofi “agung” tersebut?

Di dalam suatu masyarakat, jika pemerintahan sudah dimonopoli oleh sekelompok tertentu, maka sekelompok tertentu tersebut akan menyalahgunakan posisinya untuk kepentingannya sendiri atau golongan.

Dalam buku Negara dan Revolusi, yang ditulis Lenin pada tahun 1917, dirumuskan aturan-aturan fundamental untuk mengatasi praktek-praktek korupsi dan birokratisme di Uni Soviet setelah revolusi terjadi. Hal ini tentu mengacu pada memori, sejarah dan tradisi yang pernah ada di negara-negara borjuis sebelumnya, suatu pemerintahan yang ramai dengan korupsi dan penipuan terhadap rakyatnya sendiri. Aturan-aturan fundamental dari Lenin tersebut mengatur di mana semua pejabat yang dipilih secara bebas dan demokratis bisa ditarik mundur setiap saat, mengatur agar pejabat tidak menerima gaji lebih tinggi dari seorang buruh terampil, membentuk tentara rakyat sebagai pengganti tentara reguler, posisi birokrasi negara harus digilir.

Konsepsi fundamental di atas terbukti mampu menjadikan Uni Soviet pada masa Lenin dan Trotsky sebagai rejim yang paling demokratis di dalam sejarah politik. Kehancuran Uni Soviet setelah itu adalah hal lain. Pengkhianatan revolusi oleh Stalin kemudian meluruhkan sistem itu ke dasar jurang dan memancing para politisi Barat untuk membuat propaganda hitam atas sosialisme.

Sifat korupsi tidak lepas dari sifat ekonomi-politik borjuis-kapitalis. Konsep demokrasi borjuis ada-

lah jalan lebar yang dibuat untuk memuluskan gerak roda ekonomi-politiknya yang eksploitatif dan koruptif. Di dalam negara monarki atau totaliter, korupsi memang menjadi tradisi. Tetapi di dalam negara “demokrasi” borjuis, praktek korupsi memiliki warna lebih buruk lagi. Dalam buku Corruption, Capitalism and Democracy yang ditulis oleh John Girling, watak demokrasi liberal (borjuis) telah melahirkan korporasi politik. Politik, yang seharusnya menjadi arena bersama untuk menentukan nasib sebuah bangsa, telah bermetamorfosis menjadi “perusahaan” milik para pemegang modal. Pembicaraan mengenai politik kemudian menjadi pembicaraan tentang untung rugi dan investasi. Kontes politik di arena pemilu menjadi ajang pertarungan yang berbiaya mahal. Kelompok yang menang secara moral politik “sah” untuk mengeruk kekayaan negara guna mengembalikan besaran investasi yang telah ditanamkan plus laba. Akhirnya korupsi menjadi tindakan yang tak terelakkan. Korupsi politik merupakan dampak logis dari demokrasi borjuis.

Demokrasi borjuis adalah demokrasi kepentingan. Partai-partai politik butuh sumber keuangan yang deras untuk sampai pada kepentingan-kepentingan itu. Sumber

Kirimkan saran dan komentar  
Anda ke:  
[militanindonesia@yahoo.com](mailto:militanindonesia@yahoo.com)

**Militan**  
MEMBANGUN SOSIALISME SEDUNIA

[www.militanindonesia.org](http://www.militanindonesia.org)

keuangannya tentu tidak cukup jika hanya mengucur dari iuran anggota dan simpatisannya. Partai-partai elit ini akan berusaha menempatkan orang-orangnya pada lini-lini politik strategis untuk bisa mendapatkan dana melalui kebijakan-kebijakan politiknya yang koruptif. Partai-partai tersebut akan berusaha memasukkan orang-orangnya pada ruang-ruang basah seperti di Badan Anggaran (Banggar) DPR atau di komisi-komisi strategis lainnya.

Dalam sistem politik borjuis, yang hanya mengejar kekuasaan ekonomi dan politik untuk tujuan profit, membangun kader-kader yang loyal dan ideologis bagi partai-partai bukanlah sesuatu yang penting.

Karena visi politik mereka bukanlah membangun sistem kehidupan yang adil, membangun peradaban yang luhur, membangun kekuatan revolusioner untuk tujuan kemanusiaan. Pandangan politik mereka tidak sejauh itu. Mereka hanya butuh kekuasaan segera. Mereka butuh memapankan modalnya segera. Mereka akan membayar konstituen politiknya dari hasil korupsi, dari hasil merampok kekayaan negara, dari hasil merampok uang rakyat (pajak) yang diperuntukkan untuk pembangunan kesejahteraan.

Sungguh parah! Masa depan negeri ini, sebagaimana kata pepatah, “seperti telur di ujung tanduk.” Cepat atau lambat akan jatuh dan pecah.

Tetapi sebelum telur itu jatuh dan pecah, usaha-usaha revolusioner, sebagai tanggungjawab historis dari kelas buruh, harus segera dilakukan.

Negeri yang sudah bangkrut dengan asetnya yang kocar-kacir ini benar-benar membutuhkan oksigen baru yang segar. Agar bisa keluar dari kebangkrutan, negeri ini butuh program ekonomi ternasionalisasi yang terencana. Namun program tersebut bisa direalisasikan setelah buruh berkuasa, setelah negara buruh eksis menjadi kekuatan tak tertandingi, setelah diktatur proletariat menggantikan diktatur borjuasi! \*\*\*

# Penghambat Serikat Buruh untuk Maju

## Dari Iuran sampai Korupsi

Nophee Yohana

**S**erikat Buruh adalah tempatnya buruh untuk berkumpul, berdiskusi, mendidik diri, membangun kekuatan, mengadvokasi kasus-kasus hubungan kerja, dan memajukan organisasinya. Melalui serikat, secara bersama-sama, buruh mulai belajar membangun sebuah tradisi kolektif, dan membuat target-target untuk pencapaian tujuan organisasi.

Dalam menjalankan organisasi, serikat buruh membutuhkan biaya untuk pembuatan kartu anggota, penggandaan surat menyurat, membayar sewa rumah dan listrik, dana mogok, membuat koran suara buruh, dan membayar fulltimer bagi buruh yang sebagian besar waktunya bekerja untuk serikat. Karena serikat buruh itu organisasi kolektif, dana tersebut didapat dari iuran anggota (utama) dan sumbangan tak mengikat.

Iuran adalah modal pergerakan buat serikat buruh, Semaoen dalam Penuntun Kaum Buruh bahkan mengatakan: “Berani membayar iuran yang besar berarti berani untuk memerdekakan kaum buruh atau serikat buruh”. Selain secara eksternal serikat buruh dihadapkan pada persoalan perburuhan

(advokasi kasus, pemogokan), serikat buruh juga – sadar atau tidak – menghadapi hambatan dari internal, yakni persoalan yang dianggap remeh-temeh, yakni mulai tidak disiplin dalam iuran sampai dengan “korupsi kecil”.

Dalam serikat buruh, baik yang sudah lama berdiri dan mempunyai banyak anggota, maupun serikat buruh yang relatif baru dan jumlah anggotanya kecil, seringkali persoalan telat dalam membayar iuran, atau tidak membayar iuran, seringkali menjadi hal yang lumrah; dimaklumi; biasa; dan bahkan menjadi kebiasaan.

Persoalannya bukan pada poin “belum ada duit”, karena bukan ini hal yang kita bahas. Perilaku umum serikat buruh – baik anggota maupun pengurusnya – sering memaklumi tindakan-tindakan mulai dari menunda membayar iuran (padahal sudah ada duit, tetapi enggan segera membayar) sampai tidak membayar iuran dengan banyak dalih. Lalu, kalau ini menjadi kebiasaan, bagaimana dengan jalannya organisasi serikat buruh dan capaian-capaiannya?

Tidak disiplin dalam membayar iuran – karena sengaja menunda pa-

dahal uang ada atau hanya karena malas menyetor – atau tidak membayar iuran sama sekali, adalah pangkal dari korupsi. Baik anggota maupun pengurus yang mentradisikan tindakan ini, sedikit demi sedikit tengah mengkorupsi “modal pergerakan dan kekuatan” dari jalannya organisasi itu dan memberikan beban serta tanggung jawab tambahan kepadanya.

Selain tidak disiplin soal iuran, tidak disiplin dalam melaporkan penggunaan uang kas, uang mogok, dan uang buku/koran adalah bagian dari “korupsi kecil” (sepanjang ini luput karena tidak ada pengawasan), lebih-lebih jika uang tersebut dipakai untuk keperluan pribadi, hal tersebut adalah nyata sebagai korupsi. Tidak jarang, kita menemui bentuk pemakluman-pemakluman soal penggunaan uang oleh pengurus atau anggota diluar kebutuhan riil organisasi. Misalnya, serikat buruh membuat koran atau buku saku dengan harga solidaritas Rp. 5000. Biasanya, akan dipilih orang-orang yang bertanggung jawab untuk distribusi koran tsb, sekaligus bertanggung jawab tentang keuangannya. Namun, pada saat pelaporan berapa jumlah koran yang sudah didistri-

busi sekaligus keuangan, hanya disetor 50%, tidak sampai 100%, atau bahkan tidak disetor sama sekali, dengan alasan, terpakai untuk kebutuhan ini-itu, berniat meminjamnya dahulu dan berjanji mengembalikannya. Karena kenal, sesama kawan di serikat buruh, maka di-iyakan saja oleh kawan yang lain.

Ini bukanlah masalah – bahkan jika ada kawan dalam serikat buruh, yang benar-benar sedang kesulitan, maka kawan-kawan buruh yang lainnya pun wajib membantunya – selama hal ini diinformasikan kepada pengurus yang bertanggung jawab dalam organisasi (biasanya bendahara), mencatatnya sebagai bukti, setelah sebelumnya meminta pendapat kawan-kawan anggota yang lain. Bendahara masih punya tanggung jawab agar dikemudian hari bisa meminta untuk menyelesaikan uang buku/koran tersebut, karena ini adalah uang organisasi.

Namun, tidak jarang, tindakan memakai uang organisasi sering-

kali berujung pada tidak kembalinya uang tersebut. Bisa saja, karena pemakluman-pemakluman yang sudah biasa tadi, perilaku yang sama pun akan terulang kembali, tidak satu dua kali terjadi, melainkan terus menerus.

Tugas bendahara serikat buruh harus mengurus dengan baik segala urusan tentang keuangan organisasi, dengan menyediakan buku-buku untuk mencatat seluruh uang yang dipegangnya. Selain buku kas, buku setoran, dan buku tunggakan iuran, semua pengeluaran harus disertai dengan bukti kuitansi, dan melaporkannya dalam rapat sebulan sekali.

Dalam Penuntun Kaum Buruh, sekali lagi Semaoen mengatakan: “Sudah pasti semua pergerakan memiliki aturan tertentu untuk meng-amati atau mengawasi langkah–langkah gerakan. Siapa yang harus mengawasi itu? Tidak lain semua anggota, pengurus, dan pengurus besar. Anggota-anggota harus mengawasi apakah pengu-

rus-pengurus cabang dan pengurus besar benar-benar menjalankan kewajibannya, berikhtiar dengan baik, dan memperhatikan keperluan para anggota. Dan apa betul mereka mengurus uang organisasi dengan baik.”

Dalam banyak kasus, longgarnya pengawasan dan rasa sungkan antar kawan sering menjadi penyebab organisasi berjalan tidak seimbang. Bahkan, tidak jarang, serikat-serikat buruh yang lebih dari 10 tahun berdiri, runtuh begitu saja, minimal mengalami kemunduran dan para aktivisnya mengalami disorientasi dalam gerakan. Semuanya bisa ditelisik dari bagaimana serikat buruh membangun tradisinya sejak awal. Jika tradisi yang dibangun di dalam serikat buruh itu rapuh, maka dengan mudah sekali akan runtuh. Ibarat membangun rumah, jika pondasinya tidak kuat, maka dengan mudah akan hancur! \*\*\*

# Menangani Korupsi Lewat Pemerintahan Buruh

## Empat Syarat Negara Buruh Untuk Memberantas KKN

Ted Sprague

**K**egagalan rejim SBY dalam menangani korupsi harus membuat kita mempertanyakan kemampuan sistem pemerintahan kapitalis ini untuk memberantas penyakit akut ini. Bahkan kita harus mulai berpikir bahwa sebenarnya korupsi adalah metode utama dari rejim penguasa untuk melanggengkan kekuasaannya. Tidak bisa tidak, karena satu-satunya cara segelintir orang bisa berkuasa atas banyak orang adalah lewat penipuan.

Jangan kita terkecoh oleh negara-negara kapitalis Amerika dan Eropa yang dikabarkan bersih dari korupsi. Negara-negara Barat telah menyempurnakan korupsi mereka sedemikian rupa sehingga KKN pun telah menjadi ‘legal’. Sementara, negara-

negara berkembang seperti Indonesia masih melakukan korupsi secara kasar, seperti halnya banyak produk dalam negeri kita lebih kasar kualitasnya daripada produk-produk Barat.

Negara kapitalis adalah sumber korupsi, dan tidak bisa diharapkan untuk membersihkan dirinya. Niscaya, ia harus diganti dengan sebuah sistem pemerintahan yang baru. Satu negara pernah melakukan ini, yakni negara Rusia atau Uni Soviet.

Hampir seratus tahun yang lalu, yakni pada tahun 1917, kaum Marxis Rusia mengobarkan revolusi buruh dan sebuah pemerintahan buruh yang pertama di dunia lahir di Rusia. Pemerintahan buruh ini bentuk dan isinya sangat berbeda dari pemerintahan kapitalis. Yang pertama dilakukan oleh kaum Marxis Rusia adalah membubarkan pemerintah-

an kapitalis dan membentuk sebuah sistem pemerintahan yang baru, yakni sistem pemerintahan Soviet.

Pemerintahan kapitalis, dengan segala kebusukan dan korupsinya, tidak bisa digunakan oleh kaum buruh untuk mengubah nasib mereka; begitu pikir Lenin, pemimpin Marxis Rusia. Lenin lalu mengajukan empat kondisi untuk negara buruh ini, dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Syarat pertama, semua pejabat, tanpa pengecualian, harus dipilih oleh rakyat dan dapat direcall atau diganti setiap saat. Banyak pejabat di Indonesia yang mendapatkan posisinya karena nepotisme atau menyuap. Bahkan pejabat-pejabat yang terpilih pun hanya dapat diganti setiap 4 atau 5 tahun, sehingga kalau mereka terbukti tidak bersih rakyat hanya dapat berkeluh kesah saja tanpa bisa memecat mereka.

Syarat kedua, semua fungsionaris negara menerima gaji yang sama

dengan rakyat pekerja. Tidak boleh lagi ada bonus-bonus besar untuk pejabat. Dengan ini, maka hanya orang-orang yang benar-benar ingin melayani rakyat yang akan menjadi pegawai pemerintah. Selain itu, kalau presiden, menteri, anggota DPR dan MPR semua menerima gaji yang sama dengan buruh, mereka dapat memahami kehidupan buruh dengan lebih baik. Mana mungkin anggota DPR bergaji 50 juta bisa paham kehidupan buruh dan tani yang berpenghasilan 1 juta?

Syarat ketiga, semua tugas menjalankan pemerintahan harus dirotasi oleh rakyat. Bila semua orang adalah birokrat, maka tidak ada lagi birokrat. Birokrasi negara adalah sumber korupsi. Dengan semakin majunya teknologi, dan dengan

meningkatkan pendidikan rakyat, maka semua tugas negara akan dapat dengan mudah dilakukan oleh semua rakyat. Dengan demikian tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan di tangan segelintir birokrat, yang biasanya bermuara pada KKN.

Syarat keempat, badan khusus bersenjata (polisi dan tentara) harus dibubarkan dan diganti dengan rakyat bersenjata. Rakyat bersenjata bukan berarti memberikan pistol ke semua orang. Polisi adalah badan khusus pemerintahan kapitalis untuk menindas rakyat, dan mereka juga terlibat dalam korupsi. Ini harus diganti dengan organ-organ ketertiban rakyat, yang dibentuk secara demokratis oleh rakyat sendiri di komunitas-komunitas mereka, dimana secara bergiliran mereka bisa men-

jaga keamanan komunitas. Rakyat harus menjadi polisi mereka sendiri. Dengan demikian, "polisi rakyat" ini dapat menindak para koruptor dan juga bersih dari korupsi. Angkatan bersenjata harus dibubarkan dan diganti dengan milisi rakyat. Tentara harus datang dari rakyat pekerja sendiri, dibentuk oleh rakyat pekerja secara demokratis dan hidup bersamanya (bukan di barak) sehingga dapat memahami kehendak rakyat.

Empat kondisi ini dimajukan oleh Lenin sebagai syarat pemerintahan buruh yang bersih dan mampu menjalankan tugasnya untuk membangun sosialisme. Pembentukan pemerintahan buruh dengan empat syarat ini adalah satu-satunya cara revolusioner untuk membatasi korupsi dari bumi Indonesia. \*\*\*

## SOSOK KIRI

# Tak Berhenti Kecuali Mati Hank Sneevliet (1883-1942)

Pandu Jakasurya



Pada tahun 1913 seorang mantan ketua serikat buruh kereta api Belanda datang ke Indonesia untuk mencari penghidupan. Di Negeri Belanda namanya telah tercantum dalam daftar hitam karena haluan-nya yang radikal. Ia adalah Henk Sneevliet.

Taklamasetelahberolehpekerjaan, Sneevliet mendirikan Perhimpunan Sosial-Demokratik Hindia, ISDV (Indische Sociaal-Democratische

Vereniging) pada tahun 1914. Mula-mula ISDV berintikan 85 orang yang berasal dari dua partai sosialis di Negeri Belanda, SDAP dan SDP, yang menetap di Indonesia. Mereka mengintrodusir idea-idea Marxis kepada kaum terpelajar bumiputera yang sedang mencari jalan untuk melawan kekuasaan penjajah.

Pada saat pembentukannya, ISDV belum menuntut kemerdekaan Indonesia. Dalam tahap ini ISDV mempunyai sekitar 100 orang anggota. Di antara mereka hanya ada tiga orang Indonesia. Tapi dengan cepat ISDV bergerak ke arah yang radikal. Di bawah pimpinan Sneevliet, ISDV merasa tidak nyaman dengan kepemimpinan SDAP yang revisionistik di Negeri Belanda. Pada 1917 faksi reformis dari ISDV memisahkan diri. Mereka membentuk ISDP (Partai Sosial-Demokratik Hindia). Pada tahun yang sama ISDV meluncurkan terbitan pertamanya dalam bahasa Indonesia, Soeara Merdeka.

ISDV-nya Sneevliet melihat Revolusi Oktober di Rusia sebagai teladan yang harus diikuti di Indonesia. ISDV pun bekerja di kalangan para

prajurit dan pelaut Belanda di Indonesia. Para "Pengawal Merah" (sesuai dengan nama pasukan soviet pekerja dan prajurit di Rusia) terbentuk. Dalam tiga bulan mereka mencapai jumlah 3.000 orang. Di akhir 1917 para prajurit dan pelaut itu memberontak di basis utama angkatan laut Hindia Belanda, Surabaya. Mereka membentuk soviet-soviet. Pemerintah Kolonial menindas soviet-soviet Surabaya dan ISDV. Mereka mengirim pulang para pemimpin ISDV yang berkebangsaan Belanda. Sneevliet tak terkecuali. Pemerintah Kolonial juga menghukum para pemimpin pemberontakan prajurit dan pelaut dengan 40 tahun penjara.

Pengusiran terhadap Sneevliet tidak luput dari perhatian Mas Marco Kartodikromo, seorang jurnalis bumiputera berhaluan Kiri. Mas Marco Kartodikromo menanggapi "pembuangan" Sneevliet itu dengan mengekspresikan rasa kagum dan hormat kepadanya: "Sekarang jaman I.S.D.V., jaman mana yang kita harus berkata terus terang kepada publik, mengertinya: bangsa bangsa

harus kita katakan bangsat juga, dan bangsa baik pun kita katakan baik. Lantaran Sneevliet dibuang ... barangkali semua pemerintahan ... ada di dalam perintahnya kapitalisme... Sneevliet berani sampai dibuang! ... Bangsa apakah yang tertindas di Hindia sini? Yaitu bangsa kita. Mengapakah orang Belanda seperti Sneevliet yang mesti membela tindakan-tindakan itu, dan sampai ia berani dibuang, sedang bangsa kita yang mengaku menjadi pemimpin rupa-rupanya jarang yang berani bergerak seperti Sneevliet” (Kartodikromo, “Sneevliet Dibuang!!!”, Sinar Hindia, 10 Desember 1918).

Mas Marco juga menyerukan agar kaum bumiputera tampil ke depan meneruskan perjuangan Sneevliet membela kaum tertindas dan melawan kaum penindas, yakni Pemerintah Kolonial dan kaum kapitalis: “ ... Sesungguhnya keadaan itu, keadaan yang terbaik! Kalau menilik kesusahannya bangsa kita pada ini waktu, seharusnya kita sendiri mesti bergerak dua kali lebih keras daripada

pergerakannya Sneevliet dan konco-konconya.”

ISDV juga mendirikan faksi di dalam organisasi Sarekat Islam. Dua anggota SI dari Semarang, Semaun dan Darsono, tertarik kepada idea-idea sosialis dan komitmen Sneevliet terhadap kaum buruh Indonesia. Di samping itu, banyak anggota SI terdorong untuk mendirikan Sarekat Rakyat – yang lebih revolusioner ketimbang SI, pula sangat dipengaruhi Marxisme.

Pada tahun 1919, ISDV beranggotakan sekitar 400 orang. Dari jumlah tersebut, ada 25 orang yang berkebangsaan Belanda dan beberapa orang Tionghoa. Selebihnya adalah kader-kader bumiputera. Pengusiran yang dilakukan Pemerintah Kolonial terhadap pemimpin-pemimpin dan kader-kader berkebangsaan Belanda di satu sisi dan kaderisasi terhadap kaum muda bumiputera di sisi lain, telah membuat ISDV menjelma sebagai organisasi perjuangan kaum bumiputera Hindia Belanda. Ibu Pertiwi sedang hamil tua. Ia akan

segera melahirkan jabang bayi berbedung kain merah!

Dalam pada itu, Sneevliet terus bergerak. Pada 1920 ia mewakili ISDV dalam Kongres Kedua Komintern di Moskow. Selanjutnya pada 1921-1923 ia menjadi perwakilan Komintern di Tiongkok. Kembali ke Negeri Belanda, ia menjadi ketua Sekretariat Nasional Buruh. Pada 1929, ia mendirikan Partai Sosialis Revolusioner dan terpilih sebagai ketuanya. Ketika partai itu berubah nama menjadi Partai Buruh Sosialis Revolusioner, Sneevliet menjadi sekretaris pertama. Kemudian ia menjadi ketua sampai 1940. Sneevliet juga sempat menjadi anggota parlemen Negeri Belanda, 1933-1937. Dalam Perang Dunia II, ia memimpin kelompok perlawanan yang bernama Front Marx-Lenin-Luxemburg. Kaum fasis Nazi menangkap dan mengeksekusinya pada 1942. Sneevliet baru berhenti berjuang setelah ia menghembuskan nafasnya yang penghabisan! \*\*\*



# Maling

**Klewer - Buruh Gresik**

**S**ukirno sudah dua hari mendekam di kantor Polsek Suci, Gresik. Hanya karena ingin bertahan hidup, ia harus menemui peristiwa tragis dalam hidupnya. Perbuatannya memang salah, pikirku. Tetapi ini semata-mata karena tak ada jalan lain. Aku tahu persis bagaimana kualitas hidupnya setelah di-PHK. Rasa frustrasi telah membuat alur hidupnya berantakan!

Nyaris tak ada penghasilan setelah ia dikeluarkan tanpa pesangon dari tempatnya bekerja. Padahal perut anak-istrinya harus tetap terisi. Apalagi si gendut, jatahnya harus dua piring.

Usaha apapun sudah ia lakukan, tetapi ternyata masih tetap seperti kata pepatah, tak ada yang semudah membalik telapak tangan. Usaha jual nasi tidak laku. Hutang menumpuk. Anak-anaknya harus bayar sekolah. Rumah tinggalnya sudah habis kontrak. Dan seterusnya-seterusnya. Begitulah persoalan yang selalu menimpa orang kecil, ketika jatuh, selanjutnya tertimpa tangga.

Tanpa berpikir panjang, dia mengambil jalan pintas. Ia melirik burung Cak Malikin, seorang juragan tambak. Kata orang burung itu bernilai jutaan. Mendengar kabar itu, seketika air liurnya menetes tak bisa ditahan. Pikirannya langsung melambung. Usai mengambil burung nanti malam, mungkin pikirnya, besok pagi-pagi langsung bisa ke pasar burung, menjualnya, dan pulang pasti membawa segepok uang.

Betul, malamnya ia nekat dengan mengendap-endap. Ia melompat pagar dan berjalan pelan. Burung dan sangkarnya benar-benar sudah di depan mata. Tergantung di teras rumah sang juragan tambak. Tetapi naas, baru menyentuh buntutnya, Cak Malikin terbangun dan teriak "maling". Suara Cak Malikin sontak mengundang massa. Beramai-ramai menggebukinya hingga babak belur. Belum usai digebuki massa, polisi datang dan menggiringnya ke tahanan sementara Polsek Suci. Sambil menunggu proses pengadilan, ia ditahan di tempat tahanan pengap tak layak, berdesak-desakan dengan

para maling kelas coro yang lain. Dan jangan ditanya, tahanan maling kelas coro seperti ini malah diperlakukan seperti binatang.

Ironis memang. Bandingkan dengan berita di televisi atau koran-koran, bagaimana perlakuan terhadap para maling kelas kakap alias para koruptor? Mereka bisa melenggang bebas sambil menyantap hamburger di tempat mewah; mereka punya televisi besar dan kasur empuk; mereka bisa main internet: browsing, chating dan fesbukan. Lihat saja kasus Gayus, bagaimana dia dengan bebas bisa berwisata ke Bali, nonton pertandingan bulutangkis, berjemur di pantai, bersuka-suka, dll.

Sukirno bukan koruptor. Dia tak perlu dipukuli dan ditahan dengan pasal-pasal hukum yang berat. Dia hanyalah maling kelas coro. Hasil curiannya tak akan menyebabkan kemiskinan massal.

Yach, begitulah watak hukum di negeri ini. Seperti monster di depan penjahat kelas coro, tetapi tampak kecil seperti kutu di depan para koruptor! \*\*\*

## TENTANG MILITAN

Militan adalah sebuah organisasi yang berhaluan revolusioner dengan satu tujuan utama: menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme ke bumi Indonesia dan seluruh dunia. Untuk mencapai ini, Militan mendasarkan dirinya pada kelas pekerja karena hanya kelas pekerja – dengan posisi sosial dan politiknya di dalam sistem kapitalisme – yang mampu memimpin pembebasan kaum-kaum yang tertindas dan membawa masyarakat yang baru.

Militan dibentuk karena kami sadar bahwa perjuangan rakyat pekerja membutuhkan organisasi yang mampu menyatukan kehendak jutaan rakyat menjadi satu ekspresi bersama yang terorganisir. Tanpa sebuah organisasi yang mampu menyalurkan tenaga revolusioner rakyat ke tujuan sosialisme, gerakan rakyat akan mudah dipatahkan oleh kekuatan kapitalisme. Oleh karena itu, Militan dibentuk untuk menyatukan semua kaum muda dan buruh yang militan ke dalam satu organisasi yang disiplin, bergerak sebagai satu kesatuan, dan tertempa dalam ideologi kelas pekerja: sosialisme.

Bergabunglah dengan kami untuk membangun sosialisme di bumi Indonesia dan seluruh dunia.

**Militan**  
MEMBANGUN SOSIALISME SEDUNIA

[www.militanindonesia.org](http://www.militanindonesia.org)

# SEKARAT

Jesus S. Anam

**H**idup memang tak bergerak sendiri. Ini bukan masalah takdir. Mereka yang mengendalikannya.

Sekarang malam terakhir. Anak-anakku sudah bersiap-siap. Ibunya terlihat sedang melipat-lipat pakaian. Lemari, meja-kursi dan tempat tidur biarlah tertinggal. Rasanya tidak butuh lagi. Tetapi TV perlu dibawa. Minimal untuk melihat gong-ganjing Cikeas. TV sudah kemas. Kumasukkan karung bekas terigu. Terpaksa.

Orang-orang mungkin sedang berkemas juga – bersiap-siap untuk angkat kaki. Tangisan mereka tampaknya sudah mereda. Pasti mereka sedang disibukkan dengan bagaimana memindahkan barang-barang.

Tiba-tiba terlintas wajah Mbah Karmin. Orang tua ini besok mau dibawa pakai apa? Kakinya lumpuh, matanya buta. Semoga ide Jemingan dan Ahmad untuk bikin tandu sudah jadi. Tapi jika mereka berdua lupa bikin tandu, aku akan pinjam gerobak Pak RT. Tentunya aku harus segera menghubungi Pak RT.

Hmm, anak-anak rupanya belum tidur. Mereka masih asyik nonton bola. Padahal ibunya sudah menguap terus. Biarlah, anak-anak tak harus larut dalam sedih. Ini peristiwa nyata yang tak bisa terhindar dari matanya.

Tak terasa, jam sudah menunjuk ke angka sebelas. Rokok sudah habis. Tak ada sisa uang di kantong. Sama sekali. “Uang harus diatur,” kata ibunya anak-anak tadi sore, “besok kita sudah jadi gelandangan.”

Bukankah dari dulu sudah jadi gelandangan, pikirku. Tapi biarlah, mungkin maksudnya besok benar-benar tak punya rumah.

Yach, ini pengalaman pahit yang entah ke berapa. Berkali-kali mengalami hidup seperti ini. Lari ke sana lari ke sini. Ditendang. Rumah dihancurkan. Seenaknya barang-barang diangkut ke truk. Alasannya tak jelas. Ini tanah negaralah; demi

keindahan kotalah; untuk kenyamanan bersamalah; mau dibangun pasarlah; dan alasan-alasan klise yang lain.

Geram. Lalu apa arti dan fungsi negara bagi rakyat? Padahal nilai filosofis negara bagi rakyatnya tak jauh beda seperti seorang ibu bagi anak-anaknya. Seorang ibu pasti akan sedih jika anak-anak sakit; akan resah jika anak-anaknya kelaparan, tidak punya tempat tinggal, tidak punya baju bagus, tidak pernah makan roti – apalagi hamburger; tidak sekolah, dekil, perutnya buncit, dll.

“Kalau negara membiarkan kita terus-terusan dikejar Satpol PP, berarti itu ibarat seorang ibu yang sudah tak waras!” Ucap Markum saat aku ajak bicara tentang ini kemarin.

Sudah jam tiga. Semua yang menempati tanah ini pagi-pagi harus sudah pergi. Besok alat-alat berat akan berdatangan. Aku tak bisa tidur. Matakku sungguh tak ngantuk. Pikiranku terus tertuju pada anak-anakku dan Mbah Karmin. Anak-anak akan trauma. Pasti. Besok anak-anak akan melihat keluarganya diperlakukan seperti maling; melihat ayah dan ibunya diperlakukan seperti sampah; melihat orang-orang yang menempati tanah ini diperlakukan seperti tikus – dikejar-kejar, dipukul dan ditertawai.

Kasihannya Mbah Karmin. Pemulung tua ini sudah tak kuat berdiri. Kedua kakinya lumpuh. Dua anaknya semuanya gila. Sekarang istrinya yang menjadi tumpuan keluarga. Mbah Karmin belum tahu kalau semua warga kampung ini digusur. Tak ada yang tega menyampaikannya. Takut jantungnya kambuh. Rencananya besok diam-diam Mbah Karmin kami diangkat pakai tandu yang sudah dibuat Jemingan dan Ahmad malam ini. Tapi sampai sekarang kok belum ada kabar mengenai tandu?

Aku harus segera memastikannya, sebelum hari berajak pagi.

“Pak RW...Pak RW, Mbah Karmin sekarat...!”

Tiba-tiba aku dikejutkan teriakan Jemingan mengenai Mbah Karmin. Pasti ada apa-apa dengan pemulung tua itu.

“Masuk, Ngan...duduk dulu. Ada apa dengan Mbah Karmin?”

“Lho, kok bisa? Apa dia tahu tentang penggusuran ini?”

“Iya, Pak RW, istrinya baru saja keceplosan ngomong.”

“Gawat. Gak ada kendaraan untuk bawa dia ke rumah sakit! Coba kamu pinjam mobil pak Yusuf, pegawai BPN yang rumahnya seberang jalan itu lho, Ngan!”

“Sudah, Pak RW. Tapi katanya pak Yusuf pagi ini mau ke Bandung.”

“Oh, Tuhan...! Ayo kita bawa pakai gerobak Pak RT!”

Luar biasa. Kesedihan yang sempurna. Laki-laki tua ini tak pernah merasakan hidup senang. Dari kecil dia sudah jadi pemulung; sudah terbiasa ditendang dan dibanting; sering dituduh maling; tak pernah makan kenyang. Hingga pagi ini. Maaf, bahkan di saat menjelang kematiannya, ia tak pernah benar-benar menjadi manusia.

Gerobak melaju cepat menuju rumah sakit. Anak-anak muda mendorongnya bergantian. Aku berada di belakangnya. Nafasku ngos-ngosan mengikuti gerobak yang melaju terlalu cepat.

“Berhenti...berhenti...! Pak RW... Pak RW...!” Teriak Jemingan histesis. “Nafasnya sudah tak ada! Mbah Karmin sudah mati! Mbah Karmin mati!”

Seketika semua diam. Tak ada yang bicara. Semua merasa hidup seperti permainan yang tak lazim.

Satu persatu mulai merebahkan tubuhnya di trotoar. Semua memandang ke langit. Entah apa yang sedang dirasakan oleh mereka. Pasti kaget. Pasti tak percaya. Pasti semua merasa sudah gila.

“Pak RW,” ucap Jemingan pelan.

“Ada apa, Ngan?”

“Saya lelah!”

\*\*\*